

TAJUK RENCANA

Menakar Ketaatan Lurah Menjaga Pemilu Damai

SUHU menjelang Pemilu 2024, yang didalamnya juga terdapat pemilihan presiden (pilpres) semakin terasa panas. Saling hujat telah menjadi tontonan sehari-hari, di media sosial (medsos). Suasana panas kian terasa karena sikap buzzers serta hasil 'survei pesanan'.

Bumi makin panas. Ini bukanlah judul Film Indonesia tahun 1973 yang dibintangi Suzanna dan Dicky Suprpto. Tetapi inilah yang terjadi di Indonesia yang kini kian terasa suasana panas tersebut. Suasana menjelang pemilu ditambah cuaca iklim ekstrem yang sangat panas, benar-benar membuat Bumi Indonesia terik dan menyengat.

Dalam situasi seperti ini, perbedaan afiliasi apalagi pilihan, akan mudah tersengat dan membakar emosi. Karenanya, upaya mendinginkan suasana harus terus menerus dilakukan. Setelah para elite partai menyerukan pemilu damai, giliran Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X mengajak para lurah dan pamong untuk menjaga netralitas Pemilu 2024. Kemampuan menjaga netralitas ini disebutnya akan membuat pelaksanaan pemilu damai, kondusif serta menjaga keutuhan NKRI.

Dalam Sapa Aruhnya di Moenumen Yogya Kembali jelas diungkap hal itu. "Saya minta, menjelang pelaksanaan pemilu, lurah dan pamong harus menjaga netralitas. Pak lurah sebaiknya tidak perlu melu kampanye. Bersikap netral saja. Jangan sampai masyarakat terpecah. Nanti susah sendiri," kata Sultan dalam 'Sapa Aruh Jogja Nyawiji Ing Pesta Demokrasi'. (KR, 29/10)

Ajakan dan peringatan baik serta simpatik. Mengingat lurah dan pamong memiliki peran strategis yang penting di masyarakat dan langsung berhadapan dengan warga. Kalau mereka mengikuti kampanye, Gubernur DIY mengkhawatirkan bila hal tersebut akan mengoyak rasa persatuan warga di lingkungannya.

Sri Sultan Hamengku Buwana

X tidak bisa mengabaikan adagium politik yang dikemukakan Lord Acton (1833 - 1902) : *power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan absolut korupsinya absolut juga). Paham bila korupsi, dimaknai sebagai penyalahgunaan secara luas, Gubernur DIY merasa harus menyampaikan peringatan tersebut. Sebab, korupsi dalam hal penyalahgunaan bisa terjadi di semua level.

Sejatinya, dalam UU No 6/2014 - yang revisinya masih dibahas dan awal Oktober baru disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR, namun tidak menjadi prolegnas prioritas - sudah jelas mengatur larangan tersebut. Dalam pasal 29 huruf (g) UU No 6/2014 tentang Desa disebutkan *kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik*. Selanjutnya huruf (j) menyebutkan : *dilarang ikutserta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah*. Untuk perangkat desa, aturan yang sama termaktub dalam pasal 51.

Pengaturan ayat 29 tersebut diteruskan dengan jelas dalam pasal 30 ayat (1) UU No 6/2014. *Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis*. (2) *Dalam hal ini sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian*.

Aturan jelas. Peringatan dini sudah disampaikan. Untuk menakar ketaatan lurah menjaga pemilu damai, tinggal bagaimana pengawasan dan juga keteladanan elite terutama eksekutif level di atasnya. Karena kita tahu, bangsa ini masih sangat kuat memegang teguh budaya paternalistic. Lurah pun menghadapi dilemma. Ketika eksekutif 'di atasnya' - bupati/walikota/gubernur - adalah petugas partai yang ditugaskan menjadi jurkam. □f

MENJELANG pemilu, perhatian pada kaum muda tiba-tiba menjadi prioritas partai-partai politik. Semua partai politik mengupayakan agar kelompok sosial ini menjadi sekutu penting dalam kampanye pemilu mereka. Ini tentu sangat beralasan bila kita melihat data pemilih tetap pemilu 2024 yang ditetapkan KPU. Mayoritas pemilih berasal dari kelompok generasi melineal dan Z yakni sebanyak 56,45 % dari total pemilih.

Meskipun partai politik melibatkan banyak generasi muda, namun keterlibatan itu belum tentu memenuhi kepentingan kaum muda tersebut. Hanya sedikit dari mereka yang direkrut masuk ke dunia politik elektoral mewakili partai yang mereka dukung. Mereka juga kurang terwakili secara memadai dalam lembaga-lembaga politik. Jumlah anggota legislatif (2019-2024) yang berusia 21 hingga 40 tahun hanya sekitar 16%. Walaupun berkontribusi besar bagi partai politik, mereka memiliki peluang yang terbatas dan masih belum memiliki akses yang setara.

Hanya Memanfaatkan

Partai politik yang hanya memanfaatkan kaum muda untuk kepentingan kampanye dan perolehan suara tanpa memberikan perhatian nyata terhadap kepentingan mereka adalah fenomena yang cukup umum. Hal ini terjadi ketika partai hanya melihat generasi muda sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, tetapi kurang memberikan perhatian yang besar kepada isu-isu penting yang relevan bagi mereka.

Partai politik sering kali mengambil pendekatan transaksional. Mereka menarik kaum muda dengan janji-janji politik yang menarik, seperti peluang pekerjaan, perubahan dalam sistem pendidikan, atau peningkatan kesejahteraan generasi muda. Mereka aktif mengorganisir kampanye yang melibatkan kaum muda, mengadakan konser-konser, dan membuat konten kreatif dan meme yang

Andreas A Susanto

mendukung kampanye yang menarik lewat media sosial.

Namun, begitu pemilu berakhir dan partai berhasil meraih suara, politisi partai sudah kurang tertarik pada isu-isu inti yang mempengaruhi masa depan generasi muda, baik di dalam maupun di luar politik. Partai tidak memberikan wadah atau platform yang sesuai untuk pemuda



KR-JOKO SANTOSO

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan atau berkontribusi pada perubahan yang diinginkan. Sebagian besar politisi tidak banyak terlibat dalam pemberdayaan ekosistem yang dapat mendorong lapangan kerja atau kewirausahaan untuk melibatkan generasi muda secara produktif.

Sudah saatnya keterlibatan generasi muda dalam politik diperlakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa yang lebih besar dengan memanfaatkan energi generasi muda. Para pemimpin kaum muda tidak boleh hanya sekadar menjadi saluran untuk

Media Baru versus Penyiaran Digital

Hazwan Iskandar Jaya

PERUBAHAN niscaya terus terjadi dari waktu ke waktu. Demikian halnya pada sektor komunikasi dan informatika. Perubahan menuju pada kemudahan dan kecepatan untuk mengakses informasi. Teknologi menyediakan hamparan platform media baru.

Tahun 2022 menjadi pondasi bagi Lembaga penyiaran televisi untuk lebih berbenah dan meningkatkan mutu pelayanannya. Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Karenanya, migrasi dari sistem analog ke digital telah memberi peluang bagi masyarakat untuk lebih banyak memilih saluran televisi yang disajikan. *Analog Switch Off* (ASO) dilakukan bertahap agar tidak terjadi kekacauan dalam satu waktu, dan dapat menata dan memperbaiki berbagai kendala di lapangan. Diharapkan 2 November 2022 program ASO telah selesai sempurna.

Demokratisasi Penyiaran

Perkembangan teknologi penyiaran multipleksing dan penyiaran *new media* turut memberi dampak pada penerapan demokratisasi penyiaran. Baik dalam hal *diversity of ownership*, *diversity of content* maupun konten lokal melalui sistem stasiun jaringan. Prinsip dasar demokratisasi penyiaran adalah *diversity/plurality and public interest*. Tiga pilar *diversity* dalam konteks Indonesia: (1) *ownership*, (2) *content*, (3) *geographical reach* (jangkauan geografis) termasuk mengkombinasikan kepentingan market dan layanan publik.

Dengan demikian, era digital telah menjadi keniscayaan untuk tumbuh dan berkembangnya industri di bidang penyiaran. Menjadi penting untuk mengatur dan mengawasi konten siaran di era digital dalam tatanan regulasi baru. *Pertama*, payung hukum yang kompre-

hensif. Hal ini mengandung prinsip keadilan dalam pengawasan konten (*equality of law protection*). Prinsip pengawasan yang sama antara pengawasan media broadcast konvensional dengan media broadcast baru. Oleh sebab itu, penyiaran patut dijamin dengan kebijakan berbentuk peraturan perundang-undangan yang komprehensif.

Kedua, menjaga kualitas konten. Terkait ihwal kualitas konten siaran, dalam implementasinya, setiap pengaturan penyelenggaraan penyiaran akan selalu berhadapan dengan isu tentang *diversity of ownership* dan *diversity of content*. Isu *diversity of ownership* muncul bertujuan untuk tidak terjadinya pemusatan kepemilikan media yang akan berdampak terhadap isi media, lebih spesifiknya masuk kedalam kehidupan politik serta pada keberagaman isi.

Sedangkan *diversity of content* hadir agar terjadinya keberagaman siaran selaras dengan budaya dari Indonesia itu sendiri sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam penyiaran. Disinilah pentingnya fungsi regulator yaitu KPI/KPID sebagai penentu dan pengawas prinsip-prinsip standar konten media yang baik dan sesuai dengan nilai dan kebudayaan Indonesia.

Perlindungan Konsumen

Ketiga, perlindungan konsumen. Tentu saja konsumen yang eforia terhadap kebebasan menggunakan media baru. Dengan menggunakan data pribadi konsumen, maka rawan akan penyalahgunaan data pribadi. Di samping itu, juga diperlukan perlindungan konsumen dari konten

memenuhi agenda para penguasa politik. Mereka harus bersuara demi kepentingan generasi muda dan bangsa. Kaum muda perlu proaktif dalam menuntut perubahan. Dan memastikan bahwa partai politik benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka, bukan hanya selama kampanye. Tetapi juga setelah pemilu.

Catatan Kinerja

Penting bagi kaum muda untuk memiliki pemahaman yang baik tentang sejarah dan catatan kinerja partai agar dapat membuat penilaian yang lebih baik. Pemuda harus bersikap skeptis terhadap janji-janji kosong. Kaum muda harus melihat isu-isu politik dan kepentingan mereka dalam konteks jangka panjang. Pertimbangan dampak kebijakan politik terhadap masa depan generasi muda dan bangsa, berpikir strategis, dan fokus pada perubahan yang berkelanjutan.

Pendidikan politik generasi muda adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyikapi tindakan partai politik secara kritis. Sikap kritis dan aktif dalam mengawasi tindakan partai politik adalah langkah penting untuk memastikan kaum muda tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat kampanye dan pendukung partai. Tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi masa depannya. □f

*) **Andreas A Susanto**, Dosen Prodi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Listrik Tiba-tiba Mati

TANPA pengumuman adanya pemadaman, listrik tiba-tiba mati di kawasan Minomartani Mlandangan, Selasa (24/10) di siang hari lalu. Listrik mati selama 2,5 jam mulai sekitar 14.30 - 17.00, bukanlah waktu yang singkat dan cukup membuat pekerjaan dan aktivitas terhalang. Yang membuat aneh, ada sebuah rumah yang dijalar dan jalan yang sama, tidak mati listriknya.

Dalam seminggu kemarin, listrik tiba-tiba padam bukan hanya terjadi sekali. Karena pada Rabu (25/10) kembali padam sekitar pukul 17.30-an, meski hanya 10-an menit. Dan Kamis (26/10) juga terjadi pada pukul 22.00 juga sekitar 10 menit. Mungkin hanya sebenarnya, sekitar 10 menit. Tetapi tiba-tiba lampu mati ini cukup menyusahakan kami. □f

*) **Ninik**, Mlandangan Minomartani Sleman

Waspada, Sampah Visual Kampanye

MESKI kampanye belum dimulai, namun sejatinya sudah berlangsung cukup lama. Dan kini sangat mungkin akan kian semarak. Karena mau tidak mau, pemasangan alat peraga sosialisasi (APS) menjadi tidak berbeda dengan kampanye. Banyak terpasang bahkan termasuk di tempat yang tidak diizinkan seperti tempat ibadah.

Sangat dimungkinkan, pemasangan APS dan sebentar lagi alat peraga kampanye (APK) akan me-

rambah dimana-mana dan kemana-mana. Maka para relawan kebersihan akan sangat perlu meningkatkan kewasdaan dan aktivitasnya, karena akan semakin marak pemasangan poster, rontek, lyer, bendera dan lainnya di tempat-tempat yang tidak semestinya. Mulai tembok, tiang listrik bahkan pepohonan. Tak lama lagi akan banyak pohon menderita karena dipaku. □f

*) **Nur Rahman**, Muja-muju Umbulharjo Yogya.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirnon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. General Manager: H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Hariyadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. Alamat E-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifulah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP